

perikatan dari calon klien baru serta melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang. Di dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari enam tahap:

- a. Mengevaluasi integritas manajemen.
- b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa.
- c. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit.
- d. Menilai independensi.
- e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan.
- f. Membuat surat perikatan audit.

2. Perencanaan Audit

Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Tujuh tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam melaksanakan auditnya:

- a. Memahami bisnis dan industri klien.
- b. Melaksanakan prosedur analitik.
- c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal.
- d. Mempertimbangkan risiko bawaan.

Auditor mempertimbangkan berbagai risiko dalam keseluruhan proses audit, sesuai dengan tahap-tahap proses auditnya. Pada tahap perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko bawaan yaitu suatu risiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang saldo akun.

- e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama.
- f. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan

3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Pelaksanaan pengujian audit atau pekerjaan lapangan yang pelaksanaannya harus mengacu ketiga standar pekerjaan lapangan. Tujuan utama pelaksanaan pekerjaan lapangan adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian internal klien dan kewajaran laporan keuangan klien.

Auditor melakukan berbagai macam pengujian, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 golongan berikut ini (Mulyadi 2014):

a. Pengujian Analitik

Pengujian ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses audit dan pada tahap *review* menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pada tahap awal proses audit, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor untuk memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Sebelum auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap objek audit, auditor harus memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perusahaan yang diaudit.

b. Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Pengujian pengendalian ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- 1) Frekuensi pelaksanaan efektivitas pengendalian yang ditetapkan.
- 2) Mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut.
- 3) Karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut.

c. Pengujian Substantif

Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter yang terdapat dalam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena kesalahan:

- 1) Penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
- 2) Tidak diterapkannya prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
- 3) Ketidakkonsistensian dalam penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
- 4) Ketidak tepatan pisah batas (*cut-off*) pencatatan transaksi.
- 5) Perhitungan (penambahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian).
- 6) Pekerjaan penyalinan, penggolongan dan peringkasan informasi.
- 7) Pencantuman pengungkapan (*disclosure*) unsur tertentu dalam laporan keuangan.

4. Pelaporan Audit

Mulyadi (2014) berpendapat bahwa tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan adalah pelaporan audit. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke standar pelaporan. Ada dua langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit:

1. Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan.

Setelah semua prosedur audit yang diperlukan selesai dilaksanakan, auditor perlu menggabungkan informasi yang dihasilkan melalui berbagai prosedur audit tersebut untuk menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses ini sangat subjektif sifatnya, yang sangat tergantung pada pertimbangan profesional auditor.

2. Menerbitkan laporan audit.

Penyajian laporan audit yang berisi pernyataan pendapat atau pernyataan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

2.5 Materialitas dan Risiko Audit

1. Materialitas

Materialitas didefinisikan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan. *Financial Accounting standar Board (FASB)* mendefinisikan materialitas, yaitu besarnya nilai yang dihilangkan atau mengakibatkan perubahan atau atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. (Sunyoto, 2014).

2. Risiko Audit

Berdasarkan Standar Auditing (SA 312) dalam Sunyoto (2014), risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Dikatakan salah saji material (*material misstatement*) jika laporan keuangan yang mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.6 Bukti Audit

Bukti audit menurut Mulyadi (2014) merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat (*corroborating information*) yang tersedia bagi auditor.

Menurut Arens, (2015) menyatakan bukti audit adalah :

“Evidence is any information used by the auditor to determine whether the information being audited is stated in accordance with the established criteria.”

Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bukti audit adalah informasi yang mendukung angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang digunakan oleh auditor untuk dijadikan dasar penilaian dengan cara membandingkan kesesuaian informasi yang disajikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis bukti audit menurut Arens, (2014) diantaranya:

1. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan atau penghitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud. Jenis bukti audit ini sering kali dikaitkan dengan persediaan kas, namun dapat pula diterapkan untuk memverifikasi surat-surat berharga, piutang dagang dan aset tetap.

2. Konfirmasi

Konfirmasi merupakan jawaban lisan atau tertulis yang diterima dari pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi atas keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Permintaan tersebut diberikan kepada klien, dan klien meminta kepada pihak ketiga yang independen untuk menjawab langsung kepada auditor tersebut. Standar audit menentukan dua jenis permintaan konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemeriksaan auditor atas dokumen-dokumen dan catatan klien untuk membuktikan informasi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan.

4. Prosedur Analitis

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lain yang muncul telah disajikan secara wajar dibandingkan dengan perkiraan auditor. Dewan standar audit menyimpulkan bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga prosedur ini diharuskan selama fase perencanaan dan penyelesaian atas semua audit.

5. Tanya jawab dengan klien

Tanya jawab merupakan diperolehnya jawaban tertulis atau informasi dari klien sebagai jawaban atas pertanyaan yang diberikan auditor.

6. Penghitungan ulang

Penghitungan ulang mencakup pengecekan ulang atas contoh-contoh perhitungan yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang atas perhitungan klien terdiri dari pengujian atas keakuratan matematis klien dan mencakup prosedur-prosedur. Sebagian besar penghitungan ulang yang dilakukan oleh auditor saat ini dilakukan dengan program komputer audit.

7. Pengerjaan ulang

Pengerjaan ulang merupakan pengujian yang dilakukan oleh seorang auditor independen terhadap prosedur pembukuan atau pengendalian yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari pembukuan entitas dan sistem pengendalian internal. Penghitungan ulang mencakup pengecekan ulang secara sistematis dan matematis, sedangkan pengerjaan ulang mencakup pengecekan atas prosedur lain.

8. Pengamatan

Pengamatan adalah penggunaan panca indera untuk menilai aktivitas-aktivitas klien. Sepanjang melakukan penugasan terhadap klien, auditor mendapatkan kesempatan untuk menggunakan panca indera mereka, penglihatan, pendengaran, sentuhan dan penciuman untuk mengevaluasi banyak hal.

2.7 Jenis Opini Audit

Menurut Mulyadi (2014) pengertian opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Laporan audit merupakan langkah terakhir dari keseluruhan proses audit. Bagian terpenting yang merupakan informasi utama dari laporan audit yaitu opini audit.

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor jika audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan, pembuktian yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (*Unqualified Opinion Report with Explanatory language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, posisi ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Pernyataan ini menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan audit harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

2.8 Audit atas Piutang Usaha

a. Pengertian piutang usaha

Menurut PSAK No 9 piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.

Piutang usaha dan lain-lain yang diharapkan tertagih dalam satu atau siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Sedangkan menurut Warren dkk (2014) piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar.

Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan harus dilaporkan (tidak digabung dengan perkiraan piutang karena sifatnya berbeda). Piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan yang dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain (Agoes 2016):

1. Piutang usaha
2. Wesel tagih
3. Piutang pegawai
4. Piutang bunga
5. Uang muka
6. Uang jaminan (*Refundable Deposit*)
7. Piutang lain-lain
8. *Allowance for bad debts* (penyisihan piutang tak tertagih)

Prinsip Berterima Umum yang lazim dalam Penyajian Piutang di Laporan Posisi Keuangan (Mulyadi, 2014):

1. Piutang usaha harus disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih oleh debitur pada tanggal laporan posisi keuangan.
2. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkapannya di laporan posisi keuangan bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah piutang bersih.
3. Jika piutang bersaldo material pada tanggal laporan posisi keuangan, harus disajikan rinciannya di laporan posisi keuangan.

4. Piutang usaha yang bersaldo kredit (terdapat di dalam kartu piutang) pada tanggal laporan posisi keuangan harus disajikan dalam kelompok utang lancar.
5. Jika jumlahnya material, piutang non usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha.

b. Tujuan Pemeriksaan Piutang

Menurut Agoes (2016), tujuan audit atas piutang antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal (*internal control*) yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas.
2. Untuk memeriksa *validity* (keabsahan) dan *authenticity* (keotentikan) daripada piutang.
3. Untuk memeriksa *collectibility* (kemungkinan tertagihnya) piutang dan cukup tidaknya perkiraan *allowance for bad debts* (penyisihan piutang tak tertagih)
4. Untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat (*contingent liability*) yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih (*notes receivable*)
5. Untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia/Standar Akuntansi Keuangan/SAK ETAP.

c. Prosedur Audit atas Piutang Usaha

Menurut Agoes (2016), prosedur audit atas piutang usaha antara lain :

1. Pahami dan evaluasi *internal control* atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan.
2. Buat *Top Schedule* dan *Supporting Schedule* piutang pertanggal neraca.
3. Minta *aging shedule* dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan (*customer*), saldo piutang, umur piutang dan kalau bisa *subsequent collectionsnya*. Selain itu perlu juga diminta rincian piutang pegawai, wesel tagih, uang muka dan lain-lain per tanggal neraca.
4. Periksa *mathematical accuracynya* dan *check individual balance* ke *subledger* lalu totalnya ke *general ledger*.
5. Test *check* umur piutang dari beberapa *customer* ke *subledger* piutang dan *sales invoice*.
6. Kirimkan konfirmasi piutang:
 - a) Tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi.

- b) Tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif.
 - c) Cantumkan nomor konfirmasi baik di *schedule* piutang maupun di surat konfirmasi.
 - d) Jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya.
 - e) Buat ikhtisar (*summary*) dari hasil konfirmasi
7. Periksa *subsequent collections* dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan (*audit field work*). Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai *subsequent collections* hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa.
 8. Periksa apakah ada wesel tagih (*notes receivable*) yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya *contingent liability*.
 9. Periksa dasar penentuan *allowance for bad debts* dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan terlalu kecil.
 10. *Test sales cut-off* dengan jalan memeriksa *sales invoice*, *credit note* dan lain-lain, lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui *invoice* sebelum tanggal neraca, sudah dikirim per tanggal neraca. Kalau belum cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa, yang dibatalkan dalam periode berikutnya.
 11. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan *correspondence file* untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan
 12. Periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).
 13. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh beberapa orang yang pendiriannya bisa berbentuk CV (Persekutuan Komanditer) maupun dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas). Baik perusahaan yang berbentuk CV maupun PT, keduanya tentu memiliki Laporan Keuangan. Tanpa adanya laporan keuangan, perusahaan akan kesulitan menganalisis kondisi dan posisi keuangan perusahaan. Salah satu karakteristik laporan keuangan adalah dapat diandalkan oleh pihak luar.

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap Perseroan Terbatas harus diaudit. Beberapa tujuan perusahaan untuk diaudit diantaranya untuk keperluan bank, untuk diakuisisi dan lain-lain. Maka dari itu, baik perusahaan tertutup maupun terbuka membutuhkan jasa pihak ketiga yang kompeten dan independen untuk memeriksa dan menilai kewajaran dalam penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat diyakini kewajarannya dan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut Agoes (2014) auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

PT XX merupakan perusahaan terbatas swasta yang menyediakan layanan dalam survei geoteknis dan pekerjaan konsultasi, yang biasanya dalam pemberian jasa dilakukan secara kredit (jasa non-tunai) sehingga akan menimbulkan piutang. Alasan utama perusahaan memberikan fasilitas piutang yaitu untuk menarik minat konsumen dalam meningkatkan penjualan. Proporsi piutang usaha PT XX pada tahun 2018 yaitu sebesar 42% dari total aset lancarnya. Mengingat tingginya proporsi piutang usaha pada PT XX jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 26% dari total aset lancarnya, dan pada tahun 2016 sebesar 18% dari total aset lancarnya, sehingga rentan terjadi salah saji.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan audit atas piutang usaha yang bertujuan membuktikan keberadaan saldo akun piutang usaha pada laporan posisi keuangan dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Selain itu untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang dan kewajaran penyajian dan pengungkapannya di dalam laporan keuangan. Sehingga audit atas akun piutang usaha akan dibahas lebih lanjut dalam laporan akhir dengan judul **“Penerapan Audit atas Piutang Usaha PT.XX Studi Empiris Pada KAP XY”**.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

- a. Menguraikan proses perencanaan audit yang dilakukan pada PT XX.
- b. Menguraikan tahap pelaksanaan pengujian audit atas piutang usaha PT XX.
- c. Menguraikan tahap pelaporan hasil audit PT XX.

1.3 Kerangka Pemikiran

Proses audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) XY menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan auditnya. Proses audit yang dilakukan oleh auditor pada umumnya yaitu penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan audit, hingga tahap pelaporan audit. Proses audit ini pun berlaku di KAP XY saat melakukan audit atas laporan keuangan pada PT XX. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan lain-lain yang diharapkan tertagih dalam satu atau siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar

Piutang usaha pada PT XX menjadi salah satu akun yang paling penting untuk diaudit, mengingat PT XX merupakan perusahaan jasa konstruksi yang penjualannya dilakukan secara non tunai. Proporsi piutang yang dimiliki oleh PT XX pada tahun 2018 terbilang cukup tinggi, yaitu sebesar 42% dari total aset lancarnya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga rentan terjadi salah saji.

1.4 Kontribusi

Adapun kegunaan atau manfaat tugas akhir ini adalah:

a. Bagi Perusahaan

Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana dan pembelajaran yang sekiranya dapat dikembangkan oleh perusahaan berkenaan dengan permasalahan piutang usaha untuk dicarikan solusi yang terbaik bagi perusahaan.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pembelajaran dan untuk menambah wawasan mengenai Audit atas Piutang pada PT XX, serta dapat digunakan sebagai referensi dan informasi tambahan dalam penulisan dimasa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Audit

Menurut Arens, (2015) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Agoes (2016) juga berpendapat bahwa auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Auditing menurut Menurut Messier, Clover dan Prawitt (2014) merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2 Tujuan Audit

Halim (2015) berpendapat bahwa tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Setelah mengetahui tujuan audit, auditor harus mengevaluasi masing-masing dari lima asersi laporan yang berkaitan dengan saldo akun tertentu atau kelompok transaksi yang sedang diperiksa.

Tujuan audit menurut Arens, (2015) adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

2.3. Jenis-Jenis Audit

Agoes (2016) membagi jenis audit menjadi dua yaitu audit ditinjau dari luas pemeriksaannya dan audit ditinjau dari jenis jenis pemeriksaannya. Ditinjau dari luas pemeriksaannya, audit bisa dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Manajemen (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan lain-lain).

3. Pemeriksaan Internal (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor :